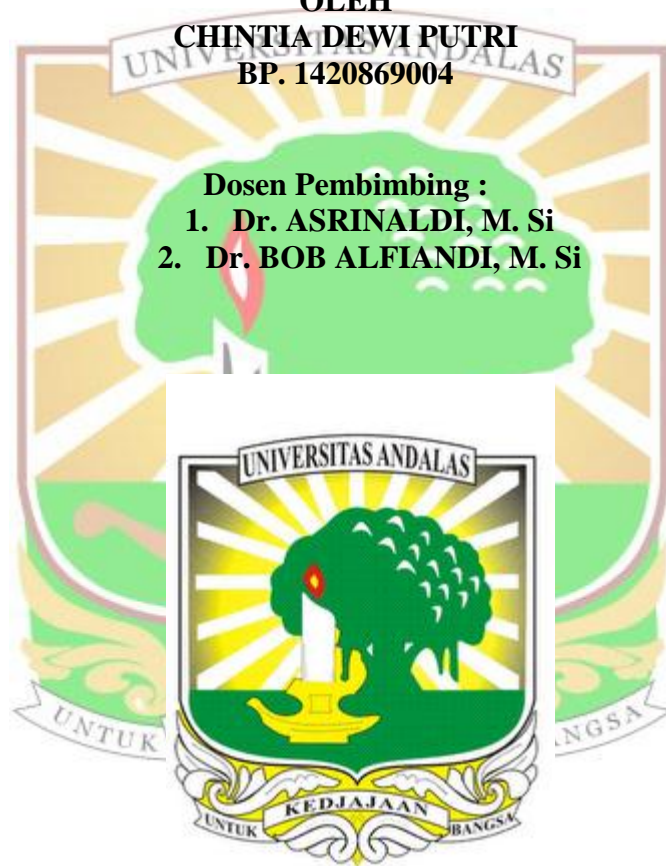


**FENOMENOLOGI KOMUNIKASI :
TAFSIR SOSIAL TERHADAP PASAL 81 DAN 100
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

**OLEH
CHINTIA DEWI PUTRI
BP. 1420869004**



**Dosen Pembimbing :
1. Dr. ASRINALDI, M. Si
2. Dr. BOB ALFIANDI, M. Si**

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2016**

**FENOMENOLOGI KOMUNIKASI :
TAFSIR SOSIAL TERHADAP PASAL 81 DAN 100
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**



**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2016**

ABSTRAK

Chintia Dewi Putri, BP : 1420869004. Program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Judul Tesis : Fenomenologi Komunikasi : Tafsir Sosial Terhadap Pasal 81 dan 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Padang Pariaman. Pembimbing I : Dr. Asrinaldi, M. Si, Pembimbing II : Dr. Bob Alfiandi, M.Si.

Terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyisakan permasalahan yaitu terjadinya fragmentasi pemahaman terhadap PP tersebut terutama untuk pasal 81 dan 100 yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat serta persentase penggunaan belanja dalam postur APBNagari. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa Pemerintah Kabupaten dan Wali Nagari di Padang Pariaman sebagai penerima pesan, mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Pemerintah Pusat dalam memaknai pasal 81 dan pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014. Teori yang digunakan adalah teori pemahaman (hermeneutik) yang dikemukakan oleh Wilhem Dhilltey dan mengelaborasinya dengan model komunikasi sirkuler Wilbur Schramm. Pendekatan yang digunakan kualitatif interpretatif (verstehen). Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan pemahaman antara Pemerintah Pusat sebagai pembuat ayat-ayat otoritatif dengan Pemerintah Kabupaten dan Wali Nagari di Padang Pariaman sebagai pelaksana dalam memaknai pasal 81 dan pasal 100 PP Nomor 43 tahun 2014 yang disebabkan oleh perbedaan sosial historis atau tafsir sosial

Kata kunci : Tafsir Sosial, PP Nomor 43 Tahun 2014, Fenomenologi Komunikasi, Hermeneutik.



ABSTRACT

Chintia Dewi Putri, BP: 1420869004. The Graduate Program of Science Communication. Faculty of Social and Political Science. Andalas University. Thesis Title: Phenomenology of Communication: Social Commentary Against Article 81 and 100 of Government Regulation No. 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law No. 6 of 2014 about the village in Padang Pariaman District. Major Advisor : Dr. Asrinaldi, M.Sc. Co – Advisor : Dr. Bob Alfiandi. M. Si.

Issuance of Government Regulation No. 43 of 2014 on implementing regulations for Law No. 6 of 2014 on the village emerging a problem, the problem deals with different understanding of the Government Regulation specially about article 81 and 100 which regulates the amount of village trustee (*wali nagari*) and the staff regular income as well as the percentage of *State Budget of Income and Expenditure (APBN)* of the *Nagari*. The question coming from this condition was why the district government and the village trustee (*wali nagari*) as the recipient of the message in Padang Pariaman had different understanding with the central government in getting the meaning of Article 81 and Article 100 of Regulation No. 43 of 2014. Hermeneutics theory, which is proposed by Wilhem Dhilltey, combined with Circular Communication Model which is proposed by Wilbur Schramm were used in this study. Qualitative interpretative (*Verstehen*) was used as the approach. This study concluded that there were differentiations in getting the meaning of the article between the central government as an authoritatively article maker against the district government and village trustee (*wali nagari*) as the executor in getting the meaning of Article 81 and Article 100 of Regulation No. 43 of 2014 in the Padang Pariman which was caused by historical social differences or social commentary.

Keywords: Social commentary, Regulation No. 43 of 2014, Phenomenology of Communication, Hermeneutics.

